

Copy ke :  
Dari : 3 Copies.

INFORMASI KHUSUS

Nomor : 300/3/27330/1984.  
Bidang : Keamanan dan Ketertiban.  
Perihal : Risalah Rakor Polkam Tingkat Menteri.

---

Bersama ini di informasikan hasil rapat Polkam Tingkat Menteri tanggal 5 Januari 1984 yang telah membahas beberapa masalah penting untuk dimaklumi, dengan - permintaan agar Sdr. dapat mendeteksi kejadian - kejadian maupun reaksi - reaksi - masyarakat mengenai Informasi tersebut.

Informasi tersebut adalah :

1. Penjelasan tentang 5 konsep RUU.

Atas usul Menteri Dalam Negeri, telah di jelaskan tentang 5 (lima) konsep Rancangan Undang Undang (RUU).

Adapun kelima Rancangan Undang - Undang itu adalah :

- a. Konsep RUU tentang perubahan Undang - Undang No.3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- b. Konsep tentang RUU Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Konsep RUU tentang perubahan atas Undang - Undang No.15/1969 tentang pemilihan Umum Anggota Badan Pemusyawaratan/Perwakilan rakyat sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang No.4/1975 dan Undang -Undang No.2/1980.
- d. Konsep RUU tentang perubahan atas Undang - Undang No 16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang No.5/1975.
- e. Konsep RUU tentang Referendum perubahan UUD 1945.

Selanjutnya oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dijelaskan bahwa masalah yang dia - tur dalam RUU Organisasi Kemasyarakatan adalah masalah yang peka. Oleh karena itu Departemen Dalam Negeri mengusahakan agar tidak dilakukan suatu statement atau - tindakan lain yang dapat menimbulkan reaksi yang tidak menguntungkan dari masya - rakat, sedangkan kelima konsep RUU itu masih akan disempurnakan dan hasilnya di - harapkan sudah disampaikan Bapak Presiden: pada minggu pertama bulan Pebruari - 1984, apabila telah mendapatkan persetujuan Bapak Presiden, RUU tersebut akan di - jukan kepada DPR.

2. Penjelasan Menteri Luar Negeri RI kepada Menteri Luar Negeri Belanda.

Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, Menteri Luar Negeri RI telah memberikan pe - jelasan kepada Menteri Luar Negeri Belanda Hans Van Den Broek sebagai berikut :

a. Mengenai pembunuhan .....

a. Mengenai pembunuhan penjahat.

- 1) Sama sekali bukan kebijaksanaan atau bagian dari kebijaksanaan Pemerintah Indonesia, karena tindakan yang demikian tidak sesuai dengan Pancasila.
- 2) Pembunuhan tersebut terjadi karena adanya pertentangan antar " Gang " penjahat melawan polisi atau berusaha melarikan diri dari kejaran Polisi.
- 3) Polisi sudah berusaha sebaik- baiknya untuk menumpas penjahat - penjahat- namun perlu disadari bahwa tidak mungkin setiap kasus dapat ditangani dengan baik oleh Polisi.
- 4) Polisi juga menghadapi kesulitan karena menurut KUHAP polisi tidak bisa - lagi menahan orang melampaui batas waktu tertentu.

b. Mengenai keadaan Timor - Timur.

- 1) Keadaan Timor Timur aman dan baik.
- 2) Tidak ada lagi operasi militer, yang ada adalah tindakan polisionia yang dilakukan terhadap pihak - pihak yang mengganggu keamanan dan ketertibandan yang menyalah gunakan usaha rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- 3) ICRC dapat melanjutkan kegiatannya ( Jadi berita yang menyatakan ICRC terpaksa menghentikan kegiatannya adalah tidak benar ).
- 4) Adanya berita - berita negatif dari para Pastor, akan lebih dipanami karena kini mereka tidak lagi memiliki peranan dan pengaruh sebesar pada waktu zaman penjajahan Portugal ( pada waktu itu Pastor mempunyai peranan Inisial mengisi kekosongan aparaturnya Pemerintah di tempat - tempat tertentu di Timor Timur ).

Menteri Luar Negeri Belanda setelah mendapatkan penjelasan yang demikian - itu telah berusaha menunjukkan sikap yang baik dan tidak mencampuri urusan dalam Negeri Indonesia.

3. Data keamanan dan ketertiban Tahun 1982 dan 1983 untuk seluruh Indonesia, yang diaporkan oleh PANGAB/PANGKOPKAMTIB.

a. Data keamanan dan ketertiban dilihat dari 8 jenis kejahatan adalah sebagai berikut :

- 1). Angka kejahatan tahun 1982 adalah sebanyak 128.674, sedangkan tahun 1983 - adalah 101.840, berarti terjadi penurunan sebesar 20, 85 %.
- 2) Perkara kejahatan yang dapat diselesaikan tahun 1982 adalah 37,93 %, sedang tahun 1983 adalah 40, 22 % berarti naik 2,27 %.
- 3) Secara terperinci angka kejahatan tahun 1982 dan 1983 adalah sebagai berikut :
  - a) Rampok todong dengan senjata api, tahun 1982 sebanyak 1925, sedangkan tahun 1983 sebanyak 1444 atau turun 25 %.
  - b) Rampok todong dengan senjata tajam, tahun 1982 sebanyak 17.539 sedang tahun 1983 sebanyak 11.036 atau turun 37,01 %.
  - c) Pencurian kendaraan bermotor, tahun 1982 sebanyak 9.904 sedang tahun 1983 sebanyak 6.336 atau turun 36,02 %.

d) Pencurian .....

- d). Pencurian berat tahun 1982 sebanyak 83.056 sedang tahun 1983 sebanyak 67.465 atau turun 18, 77 %.
- e). Penganiayaan berat, tahun 1982 sebanyak 15.493 tahun 1983 sebanyak 13.701 atau turun 11, 56 %.
- f). Pembunuhan tahun 1982 sebanyak 1.669 tahun 1983 sebanyak 1749, atau meningkat 4, 79 %.
- g). Penyalahgunaan narkotika tahun 1982 sebanyak 919, tahun 1983 sebanyak 803 turun 2, 73 %.
- h). Kenakalan remaja tahun 1982 sebanyak 902, sedang tahun 1983 sebanyak 607 atau turun 32,70 %.

b. Adapun penyelesaian perkaranya adalah sebagai berikut :

- 1). Rampok todong dengan senjata api, tahun 1982 diselesaikan 15,62 %, tahun 1983 diselesaikan 20, 83 %.
- 2). Rampok todong dengan senjata tajam, tahun 1982 diselesaikan 30,93 %, tahun 1983 diselesaikan 34,13 %.
- 3). Pencurian kendaraan bermotor tahun 1982 diselesaikan 24,53 %, tahun 1983 diselesaikan 34, 13 %.
- 4). Pencurian berat, tahun 1982 diselesaikan 36,28 % tahun 1983 diselesaikan 36,92 %.
- 5). Penganiayaan berat, tahun 1982 diselesaikan 54,56 % tahun 1983 diselesaikan 54,93 %.
- 6). Pembunuhan tahun 1982 diselesaikan 59,27 % tahun 1983 diselesaikan 51,34 %.
- 7). Penyalahgunaan narkotika, tahun 1982 diselesaikan 75,40 % tahun 1983 diselesaikan 67,70 %.
- 8). Kenakalan remaja, tahun 1982 diselesaikan 72,61% tahun 1983 diselesaikan 73,47 %.

Demikian untuk menjadikan maklum.

SUMBER : TERBUKA.  
NILAI : B.2.

Surabaya, 22 Mart 1984.

KEPADA YTH.

- 1. PEMBANTU GUBERNUR SE JATIM.
- 2. BUPATI KDH TINGKAT II/WALI-KOTAMADYA DAERAH TK II SE-JAWA TIMUR.
- 3. KANANSOSPOL KABUPATEN / KOTAMADYA SE JATIM.

A.N.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR



KEPALA DIREKTORAT SOSPOL TK I .

BUAJADI SOEDJONO